

**PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM LOMBA
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**HAZAY TIGO ARVEICO
2216021050**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM LOMBA
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
HAZAY TIGO ARVEICO**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 (Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)

Oleh

HAZAY TIGO ARVEICO

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk menilai capaian penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan secara komprehensif. Keberhasilan Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dalam meraih juara pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dalam mendukung keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan telah menjalankan perannya sebagai motivator, mediator, inspirator dan aspirator dengan cukup baik, terutama dalam mendorong partisipasi, memperlancar komunikasi menciptakan ide, dan menyerap aspirasi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian berperan efektif dalam mendukung keberhasilan meraih juara pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan, namun masih terdapat tantangan yaitu keterbatasan informasi ide dan belum meratanya informasi ide pembangunan.

Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan, Lomba Desa dan Kelurahan, Kelurahan Kedamaian.

ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE 2025 LAMPUNG PROVINCIAL VILLAGE COMPETITION (A Study in Kedamaian Village, Bandar Lampung City)

By

HAZAY TIGO ARVEICO

Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 concerning the Evaluation of Village and Sub-District Development serves as the main guideline for the implementation of the Village and Sub-District Competition, which aims to comprehensively assess the achievements of governance, regional administration, and community development. The success of Kedamaian Sub-District, Bandar Lampung City, in winning the 2025 Lampung Province Sub-District Competition cannot be separated from the active role of community institutions in supporting governance, regional administration, and community development. This study aims to analyze and describe the role of community institutions in Kedamaian Sub-District, Bandar Lampung City, in supporting the success of winning the 2025 Lampung Province Sub-District Competition. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that community institutions have performed their roles as motivators, mediators, inspirers, and aspirators quite well, especially in encouraging participation, facilitating communication, creating ideas, and absorbing community aspirations. Community institutions in Kedamaian Village play an effective role in supporting the success of winning the 2025 Lampung Province Village Competition and contribute to the implementation of government, regional, and community administration. However, there are still challenges, namely limited information on ideas and the uneven distribution of information on development ideas.

Keywords: *Community Institutions, Village And Subdistrict Competition, Kedamaian Village.*

Judul Skripsi

: **PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DALAM LOMBA KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 (Studi di
Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Hazay Tigo Arveico**

NPM

: **2216021050**

Program Studi

: **S1- Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

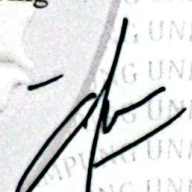
: **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

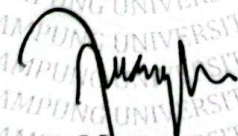

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.

NIP 19780430200812001


Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.

NIP 198205092023212017

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**

Sekretaris : **Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal lulus ujian skripsi : 9 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2026

Membuat Pernyataan



Tigo Arveico
NPM. 2216021050

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Hazay Tigo Arveico, anak ketiga dari 4 bersaudara. Dilahirkan di Menggala, pada tanggal 31 Januari 2004. Putra dari pasangan Bapak Aria Wira Budi dan Ibu Suarni. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) Swasembada 04, Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Pada tahun 2010.

Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Balai Murni Jaya pada tahun 2016. Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Peneliti selesaikan di SMPN 03 Banjar Baru pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan Menengah Atas (SMA), Peneliti selesaikan di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun, Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2022, Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Peneliti aktif berorganisasi di tingkat Universitas yaitu dengan mengikuti organisasi Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Lampung pada tahun 2022. Peneliti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Kampung Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Februari 2025. Selain itu, Peneliti mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program pemerintah yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada bulan Maret-Agustus tahun 2025.

MOTTO

“Never Forget Where You Started”

(Ade Setiawan)

“Usahakan Do’amu dan Do’akan Usahamu”

(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Kupersembahkan karya tulis ini, untuk orang tua yang ku sayangi:
Bapak Aria Wira Budi dan Ibu Suarni

Serta kakak dan adikku tersayang
Happy Liveandari Nugraha, Herdy Healtharico, Hanny Giovanny Arini

Terima kasih untuk segala doa terbaik yang selalu di langitkan dan dukungan yang
telah diberikan.

Terima kasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 (Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)"**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat bagi Peneliti untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Peneliti miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai skripsi ini terselesaikan, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya Peneliti ucapkan atas bimbingannya, terima kasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
5. Ibu Lilih Muflihah, S.IP., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta kemudahan yang telah diberikan selama proses bimbingan dan pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ibu sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, terima kasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
7. Almarhum Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti, yang semasa hidup telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang sangat berharga bagi Peneliti;
8. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
9. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Peneliti, sehingga Peneliti bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan;
10. Bapak Saipul, S.Sos., M.IP., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang telah memberikan izin untuk Praktek Kerja Lapangan;

11. Bapak I Wayan Gunawan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terimakasih telah diberi kesempatan dan pengalamannya selama PKL berlangsung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan;
12. Bapak Rohayat, S.STP., M.IP., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terimakasih banyak pak atas pengalaman, kritik, saran dan nasihat yang diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak selama membimbing saya, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan pada Bapak dan Keluarga;
13. Kepada seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terimakasih telah memberikan pengalaman dalam dunia kerja, terimakasih selalu memberikan canda tawa saat saya melaksanakan PKL MBKM di instansi tersebut. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT;
14. Ibu Neti Gusnina, S.E., M.M., selaku Lurah Kedamaian beserta masyarakat Kelurahan Kedamaian yang telah bersedia menjadi tempat untuk objek Penelitian bagi Peneliti. Terimakasih telah membantu Peneliti dalam mencari data-data pendukung untuk penyelesaian skripsi ini;
15. Kedua orangtua tercinta Bapak Aria Wira Budi dan Ibu Suarni. Terimakasih untuk semua doa yang telah dicurahkan untuk saya baik dalam proses Penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya supaya saya dapat menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat untuk orang lain. Papa dan mama telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik dengan semampu saya. Terimakasih karena selalu ada untuk saya, semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun papa dan mama berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT. berikan dalam hidup saya supaya saya dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah papa dan mama ku tersayang;

16. Kepada kakak Peneliti, Happy Liveandari Nugraha dan Herdy Healtharico beserta adik Peneliti, Hanny Giovanny Arini. Terima kasih atas kasih atas sayang yang tak kalah tulus dan dukungan yang tak pernah putus serta selalu menjadi sosok pelindung, sekaligus teman dalam hidup Peneliti;
17. Kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap Peneliti;
18. Kepada teman-teman Kopma Unila yaitu Anan, Randy, Yusof, Jovan, Helmi, Arsyah, Fairuz, Reza, Andreas, Arya, Adhi, Andrian, Naufal, Ravael, Wildan, Fadil, Dian, Febrianti, Rizka, Ayu, Lia, Febbiola, Dinda, Lathifa, Syartika, Sora, Revalina, beserta lainnya. Terima kasih untuk segala pengalaman dan kenangan yang tak terlupakan kepada Peneliti;
19. Kepada Demisioner Kabinet Pasancaya dan keluarga besar Kopma Unila. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan selama masa kepengurusan;
20. Kepada Demisioner UKA UHUY Kopma Unila yang terdiri dari Incik Muhammad Agung, Sukma Maulana, Dio Wahyu Pratama dan Fauziah Andini. Terima kasih sudah bekerja sama, menemani, membantu, mendukung dan menyemangati Peneliti sampai akhir kepengurusan di Kopma Unila;
21. Kepada teman-teman KKN Kampung Sriwijaya Mataram yang terdiri dari Aga, Husain, Naufal, Fikri, Rodhita, Rere, Karin, Dea, Anika, Ghafira, Fathia, Rini, dan Lisa. Terimakasih atas pengalaman yang tak terlupakan dan sudah saling mendukung serta masih menjaga hubungan baik hingga sekarang;
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Peneliti berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Januari 2026

Peneliti

Hazay Tigo Arveico

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Peran	12
2.1.1 Pengertian Peran	12
2.1.2 Fungsi Peran	13
2.1.3 Jenis-Jenis Peran.....	15
2.1.4 Struktur Peran.....	15
2.2 Tinjauan Lembaga Kemasyarakatan	16
2.2.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan	16
2.2.2 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan.....	17
2.2.3 Tujuan Lembaga Kemasyarakatan	19
2.2.4 Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan	20
2.3 Tinjauan Peran Lembaga Kemasyarakatan	21
2.3.1 Peran Lembaga Kemasyarakatan	21
2.3.2 Peran Rukun Tetangga (RT)	22
2.3.3 Peran Rukun Warga (RW)	23
2.3.4 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).....	23
2.3.5 Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	23

2.3.6 Peran Karang Taruna	24
2.4 Tinjauan Lomba Desa dan Kelurahan	24
2.4.1 Pengertian Lomba Desa dan Kelurahan	24
2.4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	25
2.4.3 Evaluasi Bidang	25
2.5 Kerangka Berpikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Informan	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Pengolahan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data	36
3.9 Teknik Validasi Data	36
IV. GAMBARAN UMUM	38
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedamaian	38
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah	39
4.1.2 Kondisi Geografis	39
4.1.3 Orbitasi	39
4.2 Potensi Penduduk	40
4.2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kedamaian	40
4.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Motivator Masyarakat	43
5.1.1 Mendorong Partisipasi Masyarakat	43
5.1.2 Menumbuhkan Semangat Gotong Royong	50
5.2 Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mediator Antara Masyarakat dan Pemerintah	61

5.2.1 Penyampaian Kebijakan	61
5.2.2 Koordinasi Antara Lembaga Kemasyarakatan	68
5.3 Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Inspirator Pembangunan	75
5.3.1 Inovasi Program.....	76
5.3.2 Mendorong Kreativitas	85
5.4 Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Aspirator Masyarakat.....	92
5.4.1 Penyerapan Aspirasi	92
5.4.2 Pengawasan Realisasi	101
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	113
6.1 Simpulan	113
6.2 Saran.	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pemenang Juara Lomba Kelurahan Tahun 2019-2025.....	4
Tabel 2. Daftar Informan.....	31
Tabel 3. Nama – Nama Kepala Kampung atau Lurah di Kelurahan Kedamaian.	38
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Kedamaian berdasarkan Jumlah KK.....	40
Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	41
Tabel 7. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia.....	41
Tabel 8. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 9. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	41
Tabel 10. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan	42
Tabel 11. Jumlah Sarana Keagamaan.....	42
Tabel 12. Triangulasi Data Penelitian	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	27
Gambar 2. Kegiatan pasar murah.....	47
Gambar 3. Kegiatan Jum'at Bersih dan Selasa Bersih.....	57
Gambar 4. Pembagian beras oleh Bapanas.	65
Gambar 5. Kegiatan Musrenbang	66
Gambar 6. Kegiatan berbagi takjil pada saat bulan Ramadhan	72
Gambar 7. Pos Koperasi Kelurahan Merah Putih	79
Gambar 8. Kegiatan Kerajinan Tangan oleh PKK	80
Gambar 9. Bank Sampah.....	81
Gambar 10. Pertemuan atau musyawarah bersama Kader PKK.....	88
Gambar 11. Layanan pengaduan pada website resmi Kelurahan Kedamaian.	97
Gambar 12. <i>Eco-enzyme</i>	104
Gambar 13. Perbaikan Infrastruktur Jalan	105

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
Destana	: Desa Tangguh Bencana
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
KK	: Kartu Keluarga
KPM	: Kader Pemberdayaan Masyarakat
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KWT	: Kelompok Wanita Tani
Linmas	: Perlindungan Masyarakat
LK	: Lingkungan
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPMK	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Miras	: Minuman Keras
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pokja	: Kelompok Kerja
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
TP PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
UP2K	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dan kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pelaksanaannya harus dilakukan secara serasi, terpadu, serta memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi di seluruh wilayah desa maupun kelurahan. Setiap program pembangunan perlu disusun berdasarkan prioritas dan potensi yang ada, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan desa juga harus bertumpu pada strategi dasar tipologi pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tujuan akhir memperkuat ketahanan nasional serta menanamkan dan memantapkan wawasan nusantara di tingkat lokal (Jaelani & Istiqomah, 2024:2).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap capaian pembangunan di tingkat lokal melalui penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan yang digelar setiap tahun. Lomba Desa dan Kelurahan diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan lomba, serta memberikan indikator dan instrumen penilaian yang terstruktur dan terstandar untuk digunakan oleh pemerintah daerah dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi yang telah diraih dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya persaingan yang sehat antar desa dan kelurahan, sehingga kualitas pelayanan publik di tingkat lokal dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Lomba Desa dan Kelurahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, serta kemasyarakatan dengan menggunakan instrumen evaluasi tertentu untuk menilai efektivitas dan menentukan status kemajuan desa maupun kelurahan.

Lomba Desa dan Kelurahan mencakup tiga bidang utama penilaian, yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Ketiga bidang ini dirinci lagi ke dalam indikator dan subindikator yang secara komprehensif mencerminkan kapasitas dan kinerja desa atau kelurahan (Rahmawati dkk., 2015:300). Misalnya, dalam bidang pemerintahan, dinilai bagaimana tata kelola pemerintahan dilakukan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta inovasi pelayanan publik. Aspek yang dinilai pada bidang kewilayahan meliputi pengelolaan lingkungan, penataan ruang, mitigasi bencana, dan pemanfaatan potensi wilayah. Sementara dalam bidang kemasyarakatan, penilaian berfokus pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kohesi sosial dan budaya. Penilaian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan, dilanjutkan ke kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2015, lomba ini bukan sekadar kompetisi administratif tetapi merupakan *assessment* menyeluruh terhadap efektivitas pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, Lomba Desa dan Kelurahan menjadi lebih dari sekadar perlombaan namun merupakan alat ukur pembangunan desa dan kelurahan dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*), partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, desa atau kelurahan yang mampu mencapai prestasi dalam lomba ini biasanya telah menunjukkan pencapaian signifikan dalam peningkatan kualitas hidup

masyarakatnya, efektivitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Lomba Desa dan Kelurahan juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu indikator penting yang dinilai, sebab tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan akan kehilangan arah dan legitimasi. Keberhasilan sebuah desa atau kelurahan dalam lomba ini tidak hanya ditentukan oleh kepala desa atau lurah semata, melainkan merupakan hasil dari kerja sama yang sinergis antara aparaturnya pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga masyarakat itu sendiri (Arisanti dkk., 2023:60).

Kelembagaan kelurahan adalah seluruh perangkat organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang ada di tingkat kelurahan, yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan di wilayah kelurahan (Tiwa dkk., 2017:3). Pada dinamika pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan, salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian dalam proses penilaian adalah peran dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan bukan hanya dimaknai sebagai pelibatan formal warga dalam musyawarah pembangunan, tetapi sebagai proses jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam mengenali potensi, mengakses sumber daya, dan mengambil peran aktif dalam pembangunan di wilayahnya.

Kelurahan Kedamaian di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu contoh menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam. Kelurahan ini telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dengan menjadi juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bandar Lampung dan kemudian mewakili kota untuk tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan kesiapan dokumen dan kelengkapan administrasi semata, tetapi juga menjadi bukti konkret adanya kerja kolektif antara berbagai unsur kelembagaan masyarakat yang berperan aktif dalam

proses pembangunan lokal. Dengan melihat capaian Kelurahan Kedamaian yang telah menjuarai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi dan melaju ke Tingkat Regional, perlu ditelusuri lebih dalam bagaimana peran kelembagaan seperti RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna dalam memberdayakan masyarakat secara aktif.

Pemilihan Kelurahan Kedamaian sebagai lokasi Penelitian bukanlah pilihan yang bersifat kebetulan atau semata berdasarkan pertimbangan geografis. Kelurahan Kedamaian terletak di kawasan padat penduduk dan multietnis, dengan karakter urban yang menuntut efektivitas kelembagaan sosial untuk merespon isu kepemudaan, kesehatan keluarga, hingga pengelolaan lingkungan. Lokasi ini dipilih secara rasional dan strategis karena telah terbukti secara empiris meraih keberhasilan dalam ajang Lomba Kelurahan, suatu pencapaian yang tidak mungkin diraih tanpa adanya dukungan kuat dari seluruh komponen kelembagaan yang ada.

Tabel 1. Pemenang Juara Lomba Kelurahan Tahun 2019-2025

No	Tahun	Kelurahan/Kecamatan	Kab/Kota
1	2019	Purwosari/Metro Utara	Metro
2	2020	-	-
3	2021	Rejo Mulyo/Metro Selatan	Metro
4	2022	Tejo Agung/Metro Timur	Metro
5	2023	Yosorejo/Metro Timur	Metro
6	2024	Yosodadi/Metro Timur	Metro
7	2025	Kedamaian/Kedamaian	Bandar Lampung

Sumber: Rencana Strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung 2025-2026

Tabel tersebut menampilkan daftar pemenang Lomba Kelurahan dari tahun 2019 hingga 2024 yang seluruhnya berasal dari Kota Metro, Provinsi Lampung. Dari data tersebut, terlihat bahwa setiap tahunnya kelurahan yang menjadi juara berasal dari berbagai kecamatan di Kota Metro, seperti Metro Utara, Metro Selatan, dan Metro Timur. Tidak ada satupun catatan bahwa Kelurahan Kedamaian dari Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pernah meraih juara dalam kurun waktu tersebut. Namun, pada tahun 2025 Kelurahan Kedamaian berhasil meraih juara sehingga capaian tersebut patut mendapat perhatian lebih sehingga ini menandai adanya pergeseran pola kemenangan yang selama ini didominasi oleh Kota Metro,

serta mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan pembangunan, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedamaian. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya daya saing baru dari Kota Bandar Lampung dalam hal penguatan kapasitas lokal di tingkat kelurahan. Kelurahan Kedamaian menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya dalam melihat bagaimana peran kelembagaan lokal mendorong keberhasilan mereka hingga mampu menembus dominasi pemenang sebelumnya.

Capaian menjadi juara bagi Kelurahan Kedamaian menunjukkan bahwa kelurahan tersebut telah melewati proses evaluasi ketat dari berbagai tahapan, baik dari sisi kelengkapan administrasi, kualitas pelayanan publik, hingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Posisi Kelurahan Kedamaian yang berada di pusat kota dan memiliki dinamika sosial yang kompleks berkaitan dengan keberagaman penduduk, kepadatan wilayah, serta tuntutan pembangunan yang semakin tinggi menjadikannya sebagai ruang sosial yang ideal untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara riil. Tantangan pembangunan perkotaan juga sering kali lebih berat dibandingkan wilayah perdesaan, sehingga keberhasilan kelembagaan masyarakat dalam konteks kelurahan urban layak untuk ditelaah lebih dalam. Dengan kata lain, keberhasilan Kelurahan Kedamaian dalam lomba bukan hanya menarik untuk dicatat, tetapi juga penting untuk dikaji secara sistematis.

Berdasarkan data penduduk pada monograf Kelurahan Kedamaian Tahun 2024 terdapat sebanyak 9624 jiwa, hal ini menunjukkan skala sosial yang cukup besar dan kompleks. Dalam kerangka regulasi pemberdayaan masyarakat, Permendagri No. 81/2015 dan Permendagri No. 18/2018 menegaskan pentingnya peran lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna dalam menyerap aspirasi, memfasilitasi kesejahteraan keluarga, dan mendorong partisipasi aktif warga.

Menurut Rauf dkk. (2015:209) juga menegaskan pentingnya peran lembaga kemasyarakatan penggerak, penghubung, dan penyalur aspirasi masyarakat.

Lembaga ini mampu memotivasi warga agar aktif berpartisipasi, menjadi mediator yang menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta menghadirkan ide-ide kreatif yang mendorong pembangunan. Selain itu, lembaga kemasyarakatan juga memastikan suara dan kebutuhan masyarakat tersampaikan sehingga pembangunan lebih sesuai dengan harapan warga. Melalui peran tersebut, lembaga kemasyarakatan bukan hanya pelengkap, tetapi aktor penting dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan masyarakat yang berdaya.

Berdasarkan hasil Penelitian Nita dkk. (2024), lembaga sosial di Desa Panaragan Jaya, khususnya lembaga keluarga dan lembaga adat, belum menunjukkan peran yang optimal dalam melestarikan adat budaya Lampung. Secara ideal, lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai agen pelestarian nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun, kenyataannya lembaga tersebut cenderung hanya memahami perannya secara konseptual tanpa diikuti implementasi nyata di lapangan. Aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian budaya, seperti pengenalan bahasa Lampung, aksara, serta prosesi adat pernikahan, tidak lagi dijalankan secara penuh. Beberapa tahapan prosesi adat yang dahulu dianggap penting kini mulai ditinggalkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman lembaga sosial mengenai peran mereka dengan realisasi kegiatan pelestarian budaya sehari-hari.

Hal serupa juga ditemukan dalam Penelitian Apicha (2023) yang menyoroti fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Komerang Agung. LPM yang seharusnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat justru belum maksimal dalam menjalankan perannya. Lembaga ini jarang mengadakan pertemuan, tidak memiliki jadwal yang teratur, serta kurang aktif menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, program-program pembangunan yang seharusnya dirancang secara partisipatif tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga. Kondisi tersebut membuat partisipasi masyarakat rendah dan aspirasi mereka seringkali tidak sampai pada proses perencanaan pembangunan kelurahan dengan kata lain, LPM gagal

menjalankan peran strategisnya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Sejauh ini, kajian akademik yang membahas Lomba Desa dan Kelurahan masih terbatas pada aspek administratif evaluasi teknis penyelenggaraan lomba, dan implikasi kemenangan lomba sehingga belum banyak kajian akademik yang secara mendalam menyoroti peran lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat yang berkontribusi terhadap keberhasilan Kelurahan Kedamaian meraih juara dalam lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025, terutama yang menjadikan keberhasilan tersebut sebagai titik tolak untuk membongkar praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi (Khadikah & Muljanto, 2025:567). Keberhasilan suatu kelurahan dalam lomba semestinya bukan hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi juga menjadi momentum reflektif untuk meninjau dan mendokumentasikan model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berbasis kelembagaan. Penelitian yang bersifat empirik dan kontekstual mengenai bagaimana kelembagaan ini bekerja secara sinergis di lapangan masih jarang ditemui, khususnya dalam konteks Kelurahan Kedamaian yang memiliki karakteristik urban dan kompleks.

Sebagai acuan dalam Penelitian ini, Peneliti menyertakan beberapa Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Chaniago dkk. (2019) berjudul “Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan” menyoroti peran lembaga sosial di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan tiga bentuk lembaga sosial yang berperan penting. Pertama pranata adat yang menjaga hutan adat dengan aturan berbasis kearifan lokal. Kedua lembaga pariwisata adat dan budaya yang mempromosikan potensi ekowisata berbasis tradisi dan kekayaan alam. Ketiga kelompok budidaya lebah madu yang memanfaatkan hutan secara ekonomis sekaligus menjaga kelestariannya. Pola hubungan antar lembaga bersifat

sinergis, saling melengkapi, dan diikat oleh nilai solidaritas, sistem ekonomi, tradisi, kontrol sosial, serta kepemimpinan.

2. Penelitian oleh Rosyida dkk. (2021) berjudul “Edukasi Peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Krangkong” menyoroti peran lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scenario planning*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa Krangkong secara normatif seharusnya bersifat kemitraan, konsultasi, dan koordinasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016. Namun di lapangan, tiga dari tujuh lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Karang Taruna, PKK, KPM, LPMD, Gapoktan) hanya terbentuk tetapi tidak berjalan karena kurangnya pemahaman fungsi dan lemahnya pembinaan. Peneliti merekomendasikan perlunya pendamping dan penyuluh tetap di desa, pelatihan penyusunan regulasi, serta pelatihan teknis pemerintahan desa agar lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi optimal.
3. Penelitian oleh Mala dkk. (2016) berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud” menyoroti peran LPMK sebagai mitra pemerintah kelurahan sesuai Permendagri No. 5 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 10 informan (camat, lurah, kepala LPM, pengurus LPM, tokoh masyarakat). Hasil dalam Penelitian ini menunjukkan peran LPMK yang belum maksimal dalam menampung aspirasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengendalikan pembangunan. Peran masih didominasi oleh lurah, sementara pengurus LPMK masih kurang aktif, sebagian tidak berdomisili di lokasi, keterampilan rendah, serta terkendala dana operasional. Rekomendasi Penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM pengurus LPMK melalui pelatihan, keterlibatan *stakeholder* di berbagai level, serta dukungan biaya operasional agar LPMK dapat berfungsi optimal dalam menampung aspirasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Penelitian oleh Adawiah (2023) berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam Penyelenggaraan *Good Governance*: Studi Kasus Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur” menyoroti peran LPMD sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa LPMD Desa Gekbrong berperan sesuai peraturan yang berlaku, antara lain menampung aspirasi, memfasilitasi partisipasi, mengelola program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan. LPMD juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa. Faktor pendukung peran LPMD adalah kondisi geografis yang memudahkan akses informasi dan keberadaan organisasi sosial lain di desa. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya pendidikan masyarakat, serta partisipasi yang masih rendah. Meski begitu, LPMD tetap berupaya mencari solusi agar prinsip *good governance* bisa diterapkan dalam pelayanan publik dan pembangunan desa.
5. Penelitian oleh Humapi dkk. (2020) berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud” menyoroti peran LPM sebagai mitra pemerintah desa sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan (kepala desa, perangkat desa, BPD, pengurus LPM, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa LPM Desa Salibabu tidak berperan aktif dalam tiga aspek utama. Pertama, tidak aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD). Kedua, tidak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Ketiga, tidak berfungsi sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat. Penyebab utama adalah pengurus tidak aktif karena tidak ada insentif dan biaya operasional dari APBDes maupun APBD. Peneliti merekomendasikan agar LPM diberi tunjangan, biaya operasional, serta peran proporsional dalam musyawarah desa agar dapat berfungsi optimal.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu, yaitu Penelitian ini secara khusus akan menganalisis kontribusi lembaga kemasyarakatan terhadap keberhasilan kelurahan, karena sejauh ini belum ada kajian yang mengulas aspek kelembagaan secara empiris dalam konteks lomba desa/kelurahan khususnya RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berdampak langsung terhadap keberhasilan kelurahan dalam lomba masih sangat minim. Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan yang relevan secara akademik dan praktis seperti bagaimana proses di balik capaian tersebut dapat terwujud.

Sehingga Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan mendokumentasikan peran RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berkontribusi terhadap keberhasilan Kelurahan Kedamaian menjadi juara lomba kelurahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil Penelitian mampu menjadi model konseptual dan praktis yang bisa diadopsi oleh kelurahan lain, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota dan provinsi dalam merumuskan kebijakan pembinaan kelembagaan masyarakat secara lebih strategis, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam Penelitian adalah “Bagaimana peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dalam mendukung keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dalam mendukung keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam memahami peran lembaga kemasyarakatan. Secara teoritis, Penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Hasil Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu-isu pemberdayaan, kelembagaan, dan pembangunan berbasis masyarakat, khususnya dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah seperti Lomba Kelurahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian mendorong keberhasilan hingga mampu meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Temuan Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah, khususnya kelurahan dan kecamatan, dalam merancang kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Selain itu, hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh kelembagaan kelurahan lainnya dalam mereplikasi praktik baik (*best practices*) yang berhasil diterapkan di Kelurahan Kedamaian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2002:243) dalam Lantaeda dkk. (2002:2) Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Saat seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, ia sedang menjalankan perannya. Pada organisasi, setiap individu memiliki karakteristik berbeda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga. Peran dapat diartikan sebagai tanggung jawab, fungsi, atau aktivitas yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Secara esensial, peran merupakan serangkaian perilaku yang muncul sebagai konsekuensi dari jabatan atau posisi tertentu yang diduduki oleh seorang individu. Cara seseorang menjalankan peran tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadiannya. Baik pemimpin di tingkat atas, menengah, maupun bawah, semuanya memiliki peran yang penting dan setara.

Menurut Poerwadarminta (1995:751) dalam Wangania dkk. (2018:3), peran dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu, sedangkan peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati suatu kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan dan peranan tidak bisa dipisahkan sehingga keduanya memiliki keterkaitan penting untuk melihat dinamika interaksi sosial yang berkembang di masyarakat, terutama dalam memahami bagaimana individu berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan itu terkait dengan pemahaman tentang peran, menurut Yeti (2014:24) dalam Wahyuningsih dkk. (2025:5) terdapat empat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program pemerintah. Fasilitas yang memadai memungkinkan proses perencanaan hingga implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Tanpa dukungan ini, program sering mengalami hambatan teknis dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Ketersediaan Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang cukup memastikan operasional, pelayanan publik, hingga pembangunan fasilitas dapat berjalan optimal. Anggaran juga mencerminkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

3. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Sinergi ini dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama. Kerja sama yang efektif dapat memperkuat kapasitas, memperluas sumber daya, dan menghasilkan pembangunan yang lebih optimal.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan memastikan kebijakan lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lokal. Tingginya partisipasi juga memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas program pemerintah.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan secara nyata dalam mendukung keberhasilan Kelurahan Kedamaian pada Lomba Kelurahan Tahun 2025.

2.1.2 Fungsi Peran

Menurut Narwoko dan Suyanto (2010:160) dalam Yuli dkk. (2023:5), peranan memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peranan menjadi salah satu unsur yang mendukung terbentuknya pola interaksi sosial yang

teratur dan membantu menjaga dinamika sosial dalam lingkungan masyarakat antara lain:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.

Peranan berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani proses sosialisasi, yaitu bagaimana seseorang belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, serta aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui peran, individu mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya dan bagaimana seharusnya bersikap dalam situasi tertentu. Dengan demikian, peranan membantu mengarahkan perilaku agar sesuai dengan harapan sosial, sehingga sosialisasi dapat berlangsung secara efektif.

2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.

Peranan juga menjadi sarana untuk mewariskan berbagai unsur budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui peran-peran yang dijalankan, tradisi, kepercayaan, nilai, norma, serta pengetahuan yang hidup dalam masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Misalnya, peran orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sebatas memberi pengajaran formal, tetapi juga menanamkan nilai moral, budaya, dan tradisi yang ada. Hal ini memungkinkan kesinambungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

3. Mempersatukan kelompok atau masyarakat.

Peranan yang dijalankan sesuai dengan harapan sosial mampu memperkuat solidaritas dan persatuan. Setiap individu atau kelompok mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga dapat saling melengkapi. Misalnya, peran tokoh masyarakat sebagai pemimpin yang memberi teladan dan arahan dapat menyatukan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, peranan berfungsi sebagai alat integrasi yang menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat.

4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan juga berkaitan dengan mekanisme kontrol sosial, karena melalui peran, setiap individu memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal ini menjaga keteraturan sosial serta mencegah terjadinya

penyimpangan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Dengan adanya peranan yang jelas, masyarakat dapat menciptakan sistem pengendalian sosial yang efektif, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung secara tertib, stabil, dan berkelanjutan.

2.1.3 Jenis-Jenis Peran

Menurut Parsons (1951:439) dalam Prasetya dkk. (2021:7), peran adalah pola perilaku normatif yang terkait dengan posisi seseorang atau lembaga dalam sistem sosial. Ia membaginya:

1. *Instrumental Role* (Peran Instrumental)

Peran ini berorientasi pada pencapaian tujuan praktis dan terukur. Lembaga kemasyarakatan mendukung pemerintah kelurahan dalam pembangunan fisik seperti jalan, drainase, dan sarana umum, serta membantu administrasi, pendataan warga, dan program ekonomi. Fokusnya adalah pada tindakan nyata untuk mencapai target pembangunan dan pemerintahan.

2. *Expressive Role* (Peran Ekspresif)

Peran ini lebih menekankan pada pemeliharaan hubungan sosial, solidaritas, dan nilai kebersamaan di masyarakat. Lembaga kemasyarakatan tidak hanya fokus pada hasil pembangunan fisik, tetapi juga pada bagaimana menjaga kekompakan dan partisipasi masyarakat agar semua program berjalan dengan baik. Misalnya, lembaga menggerakkan semangat gotong royong warga dalam kerja bakti, mendukung kegiatan sosial budaya seperti posyandu, arisan, atau lomba kebersihan lingkungan, serta menjaga keamanan dan ketertiban melalui ronda malam atau musyawarah warga. Peran ekspresif ini menjadi fondasi penting karena keberhasilan kelurahan dalam lomba tidak hanya diukur dari capaian administratif dan fisik, tetapi juga dari tingkat partisipasi, kekompakan, dan keharmonisan sosial masyarakatnya.

2.1.4 Struktur Peran

Secara garis besar menurut Soekanto (2002:22) dalam Karmenita (2023:17), secara umum, struktur peran terbagi ke dalam beberapa kategori utama yang menjadi dasar

dalam memahami pola hubungan sosial di masyarakat. Struktur ini memberikan kerangka untuk melihat bagaimana individu dan kelompok menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan sosial yaitu:

1. Peran Formal

Peran formal adalah jenis peran yang terlihat secara nyata dan mudah dikenali, karena ditandai dengan perilaku yang seragam atau serupa. Misalnya, dalam lingkungan keluarga, suami atau ayah serta istri atau ibu memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, pengasuh anak, hingga penyedia waktu untuk rekreasi.

2. Peran Informal

Peran informal adalah peran yang tidak tampak secara langsung atau bersifat tersembunyi, biasanya berhubungan dengan aspek emosional dan tidak diekspresikan secara terbuka. Fungsi utama dari peran informal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga serta menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan di dalam rumah tangga.

2.2 Tinjauan Lembaga Kemasyarakatan

2.2.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan dalam kerangka pemerintahan lokal saat ini secara normatif tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menegaskan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun peraturan tersebut secara khusus mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa, prinsip, fungsi, dan peran kelembagaan yang diatur di dalamnya dapat digunakan sebagai rujukan konseptual untuk menjelaskan lembaga kemasyarakatan secara umum sebagai wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah, termasuk pada tingkat kelurahan, sepanjang tidak bertentangan dengan karakteristik kelurahan sebagai perangkat daerah.

Menurut Soekanto (2001:219) dalam Rauf dkk. (2015:4), lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Artinya, lembaga kemasyarakatan hadir sebagai sistem aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu agar selaras dengan kehidupan sosial. Norma-norma tersebut mencakup nilai, kebiasaan, aturan, hingga hukum yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, memenuhi kebutuhan dasar, dan mendukung keberlangsungan hidup bersama.

Wujud nyata dari lembaga kemasyarakatan ini adalah asosiasi (*association*), yaitu bentuk organisasi atau perkumpulan yang secara formal maupun nonformal menjadi wadah bagi masyarakat dalam menjalankan norma-norma tersebut. Asosiasi berfungsi sebagai perantara yang mewadahi kepentingan anggota, memperkuat solidaritas sosial, serta memfasilitasi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan tidak hanya abstrak dalam bentuk norma, tetapi juga konkret dalam bentuk organisasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah wadah sosial di tingkat kelurahan yang berisi norma, aturan, dan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Lembaga ini diwujudkan dalam bentuk organisasi seperti RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang menjadi tempat warga bekerja sama dan menyampaikan kepentingannya.

2.2.2 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Rauf dkk. (2015:103) lembaga kemasyarakatan memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan sosial antara lain:

1. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan keluhan yang muncul di lingkungan mereka. Melalui lembaga ini, aspirasi warga dapat dikumpulkan dan diteruskan secara terarah kepada pemerintah desa atau kelurahan.

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
Melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan musyawarah, lembaga kemasyarakatan berperan aktif membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini mempererat hubungan antarwarga, menumbuhkan rasa saling peduli, dan memperkuat semangat gotong royong.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan
Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah mempercepat layanan publik. Misalnya, pengurusan administrasi kependudukan, distribusi bantuan, hingga layanan kesehatan.
4. Penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan
Masyarakat dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan, melaksanakan kegiatan, dan mengelola hasilnya. Keterlibatan ini membuat pembangunan lebih sesuai kebutuhan warga.
5. Penuhkhembangan prakarsa, partisipasi, dan gotong royong
Lembaga kemasyarakatan mendorong warga berinisiatif, terlibat aktif, dan bekerja sama. Semangat gotong royong dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, maupun pembangunan fisik.
6. Penggalian dan pengembangan sumber daya serta lingkungan hidup
Potensi sumber daya alam, manusia, maupun ekonomi digali dan dikelola. Selain itu, lembaga juga menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan tidak merusak keseimbangan alam.
7. Pengembangan kreativitas dan pembinaan remaja
Remaja diberi ruang untuk menyalurkan bakatnya melalui kegiatan seni, olahraga, atau organisasi. Sekaligus dicegah dari pengaruh negatif seperti narkoba dan kenakalan.
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
Program kesehatan, ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, hingga pelatihan usaha keluarga menjadi fokus lembaga. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup keluarga.

9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat

Masyarakat diberi pemahaman tentang hak politiknya. Lembaga mendukung keterlibatan warga dalam pemilu, musyawarah, atau kegiatan politik secara sehat dan bertanggung jawab.

10. Pendukung komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat

Lembaga kemasyarakatan menjadi penghubung informasi. Mereka membantu menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menyalurkan umpan balik dari masyarakat ke pemerintah.

2.2.3 Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Soekanto (2001:219) dalam Rauf dkk. (2015:82), lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia memiliki beberapa peran utama, yaitu:

1. Memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan menyediakan arahan yang jelas tentang bagaimana anggota masyarakat seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, sehingga tercipta keteraturan dan keserasian dalam interaksi sosial.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.

Fungsi ini menekankan bahwa lembaga kemasyarakatan berperan sebagai perekat sosial yang menghubungkan individu-individu agar tetap berada dalam satu kesatuan. Dengan adanya aturan dan norma yang disepakati bersama, masyarakat dapat terhindar dari konflik berkepanjangan dan mampu mempertahankan solidaritas serta kebersamaan.

3. Menjadi alat pengendalian sosial.

Lembaga kemasyarakatan juga berfungsi memberikan pegangan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*). Artinya, lembaga ini bertugas memastikan bahwa tingkah laku individu tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Pengendalian ini bisa berupa teguran, sanksi, maupun aturan tidak tertulis yang diterapkan, sehingga masyarakat tetap berada dalam tatanan yang stabil dan tertib.

2.2.4 Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan

Ciri umum lembaga masyarakat menurut Gillin (2001:230) dalam Rauf dkk. (2015:83) sebagai berikut:

1. Organisasi pola pikir dan perilaku

Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah yang menyatukan pola-pola pemikiran serta perilaku tertentu, yang kemudian terlihat dalam aktivitas sehari-hari maupun hasil konkret yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, lembaga menjadi cerminan pola kehidupan sosial yang berlangsung secara teratur.

2. Memiliki tingkat kekekalan

Salah satu ciri penting lembaga kemasyarakatan adalah sifatnya yang relatif bertahan lama. Walaupun dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, lembaga tetap memiliki kekuatan untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Mempunyai tujuan tertentu

Setiap lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan maksud atau sasaran tertentu. Tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun spiritual. Adanya lembaga kemasyarakatan, masyarakat memiliki wadah yang terorganisir untuk mengatur, mengelola, serta mewujudkan tujuan bersama.

4. Dilengkapi alat-alat perlengkapan

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga kemasyarakatan memiliki sarana atau perangkat pendukung, baik berupa aturan, struktur organisasi, maupun sumber daya manusia yang berperan di dalamnya.

5. Memiliki lambang khusus

Lembaga kemasyarakatan juga ditandai dengan adanya simbol atau lambang tertentu yang menjadi ciri khas dan pembeda dari lembaga lainnya. Lambang ini biasanya menjadi identitas yang diakui oleh masyarakat luas.

6. Tradisi tertulis maupun tidak tertulis

Setiap lembaga memiliki aturan, norma, atau kebiasaan yang dapat berbentuk tradisi tertulis, seperti undang-undang atau peraturan resmi, maupun tradisi

tidak tertulis yang berkembang dari kebiasaan masyarakat, seperti adat istiadat dan nilai-nilai budaya.

2.3 Tinjauan Peran Lembaga Kemasyarakatan

2.3.1 Peran Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Rauf dkk. (2015:294) lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa peran utama yang menjadi landasan dalam menjalankan fungsinya yaitu:

1. Motivator Masyarakat

Sebagai motivator, lembaga kemasyarakatan berperan memberi dorongan, semangat, dan rangsangan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan bersama. Kehadiran lembaga ini membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya partisipasi, baik dalam pembangunan fisik, kegiatan sosial, maupun upaya pemberdayaan ekonomi. Misalnya, ketika lembaga kemasyarakatan mengajak warga untuk ikut gotong royong, menjaga kebersihan, atau mendukung program-program kelurahan, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi karena ada teladan dan ajakan yang terorganisir. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai motor penggerak yang menumbuhkan rasa kepedulian dan partisipasi kolektif di tengah masyarakat.

2. Mediator antara Masyarakat dan Pemerintah

Sebagai mediator, lembaga kemasyarakatan menjadi jembatan komunikasi dua arah antara warga dengan pemerintah. Di satu sisi, lembaga menyampaikan kebijakan, informasi, serta program pemerintah kepada masyarakat. Posisi ini membuat lembaga kemasyarakatan sangat strategis karena mampu mengurangi jarak antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis, transparan, dan partisipatif. Dengan adanya fungsi mediasi ini, suara masyarakat lebih terwakili dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.

3. Inspirator Pembangunan

Sebagai inspirator, lembaga kemasyarakatan berperan memberi ide, gagasan, serta teladan dalam proses pembangunan. Mereka tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah, tetapi juga mampu memunculkan inovasi yang

bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, adanya ide membuat taman lingkungan, bank sampah, atau kegiatan ekonomi kreatif yang lahir dari inisiatif lembaga kemasyarakatan. Peran ini dapat mendorong masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan di desa dan kelurahan, dan juga tetap memperlihatkan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga partisipasi warga melalui lembaga kemasyarakatan yang di desa dan kelurahan.

4. Aspirator Masyarakat

Sebagai aspirator, lembaga kemasyarakatan berfungsi menyalurkan harapan, kebutuhan, dan pendapat masyarakat. Lembaga ini menghimpun aspirasi warga terkait pembangunan, pelayanan, maupun masalah sosial, lalu memperjuangkannya agar mendapat perhatian pemerintah. Peran ini penting agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program *top-down*. Dengan menjadi aspirator, lembaga kemasyarakatan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan, karena suara mereka diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.3.2 Peran Rukun Tetangga (RT)

RT adalah lembaga kemasyarakatan paling dekat dengan warga. RT menjadi penghubung utama dalam komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Salah satu perannya adalah mengurus administrasi dasar, seperti surat pengantar untuk KTP, KK, SKCK, atau pengurusan bantuan sosial. RT juga bertugas melakukan pendataan jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, hingga catatan kematian dan kelahiran. Pada kehidupan sosial, RT sering menjadi penengah saat ada konflik kecil antarwarga, misalnya perselisihan lahan parkir atau perbedaan pendapat dalam kegiatan lingkungan. Selain itu, RT menggerakkan warganya dalam gotong royong kebersihan lingkungan, perbaikan jalan, ronda malam, serta menjaga keamanan dan ketertiban (Rauf dkk., 2015:204).

2.3.3 Peran Rukun Warga (RW)

RW berperan sebagai koordinator dari beberapa RT. Aspirasi masyarakat yang dihimpun RT biasanya disampaikan kembali oleh RW kepada kelurahan, sehingga RW berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang lebih luas. RW juga membantu Lurah dalam pelayanan publik, seperti pelaksanaan program pemerintah tingkat kelurahan. Selain itu, RW menjadi forum musyawarah antar-RT untuk menyusun rencana pembangunan tingkat RW, misalnya pembangunan pos ronda, drainase, atau sarana olahraga. RW pun berperan dalam membina kegiatan sosial, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sehingga tercipta koordinasi antarwarga lintas RT (Rauf dkk., 2015:206).

2.3.4 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM memiliki peran strategis dalam pembangunan partisipatif. LPM memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan agar aspirasi masyarakat bisa masuk ke dalam agenda pembangunan pemerintah. Tidak hanya menyusun rencana, LPM juga mendorong partisipasi masyarakat agar aktif terlibat dalam pembangunan fisik seperti jalan, drainase, maupun sosial seperti kegiatan ekonomi kerakyatan. LPM ikut mengawasi jalannya pembangunan supaya sesuai kebutuhan dan tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, LPM menjadi mitra pemerintah dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat, misalnya pelatihan usaha kecil, penguatan koperasi, atau kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal (Rauf dkk., 2015:206).

2.3.5 Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga. PKK menjalankan program 10 pokok PKK yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, pangan, sandang, perumahan, hingga lingkungan hidup. Melalui berbagai kegiatan, PKK membina keterampilan rumah tangga seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan, dan mengembangkan usaha kecil keluarga. PKK juga berperan dalam perlindungan anak, pendidikan anak usia dini, dan peningkatan gizi keluarga. Perempuan diberdayakan agar bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan, bukan hanya

sebagai ibu rumah tangga tetapi juga agen perubahan sosial. Dengan perannya ini, PKK menjadi motor penggerak terwujudnya keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri (Rauf dkk., 2015:208).

2.3.6 Peran Karang Taruna

Karang Taruna adalah sebuah wadah pengembangan generasi muda di tingkat desa atau kelurahan. Karang Taruna membina kreativitas, kepemimpinan, dan kepedulian sosial pemuda melalui kegiatan terorganisir. Selain itu, Karang Taruna berperan mencegah kenakalan remaja dengan mengarahkan mereka ke kegiatan positif. Pencegahan penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu peran penting lembaga ini. Karang Taruna sering menjadi pelopor kegiatan sosial, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan. Misalnya, mengadakan turnamen olahraga, pentas seni, hingga pelatihan keterampilan kerja. Dengan begitu, potensi pemuda dapat diarahkan agar mereka lebih produktif dan memiliki daya saing tinggi, baik di bidang ekonomi maupun sosial (Rauf dkk., 2015:209).

2.4 Tinjauan Lomba Desa dan Kelurahan

2.4.1 Pengertian Lomba Desa dan Kelurahan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menjelaskan bahwa Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

2.4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pasal 2, Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Menetapkan status capaian perkembangan desa dan kelurahan serta mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember. Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan.

2.4.3 Evaluasi Bidang

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dijelaskan bahwa terdapat tiga bidang utama yang menjadi fokus dalam proses evaluasi. Bidang ini berfungsi sebagai dasar penilaian untuk mengukur capaian pembangunan serta kinerja pemerintahan desa dan kelurahan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan

Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek

- a. Pemerintahan;
- b. kinerja;
- c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
- e. pelestarian adat dan budaya

2. Bidang Kewilayahan

Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. identitas;

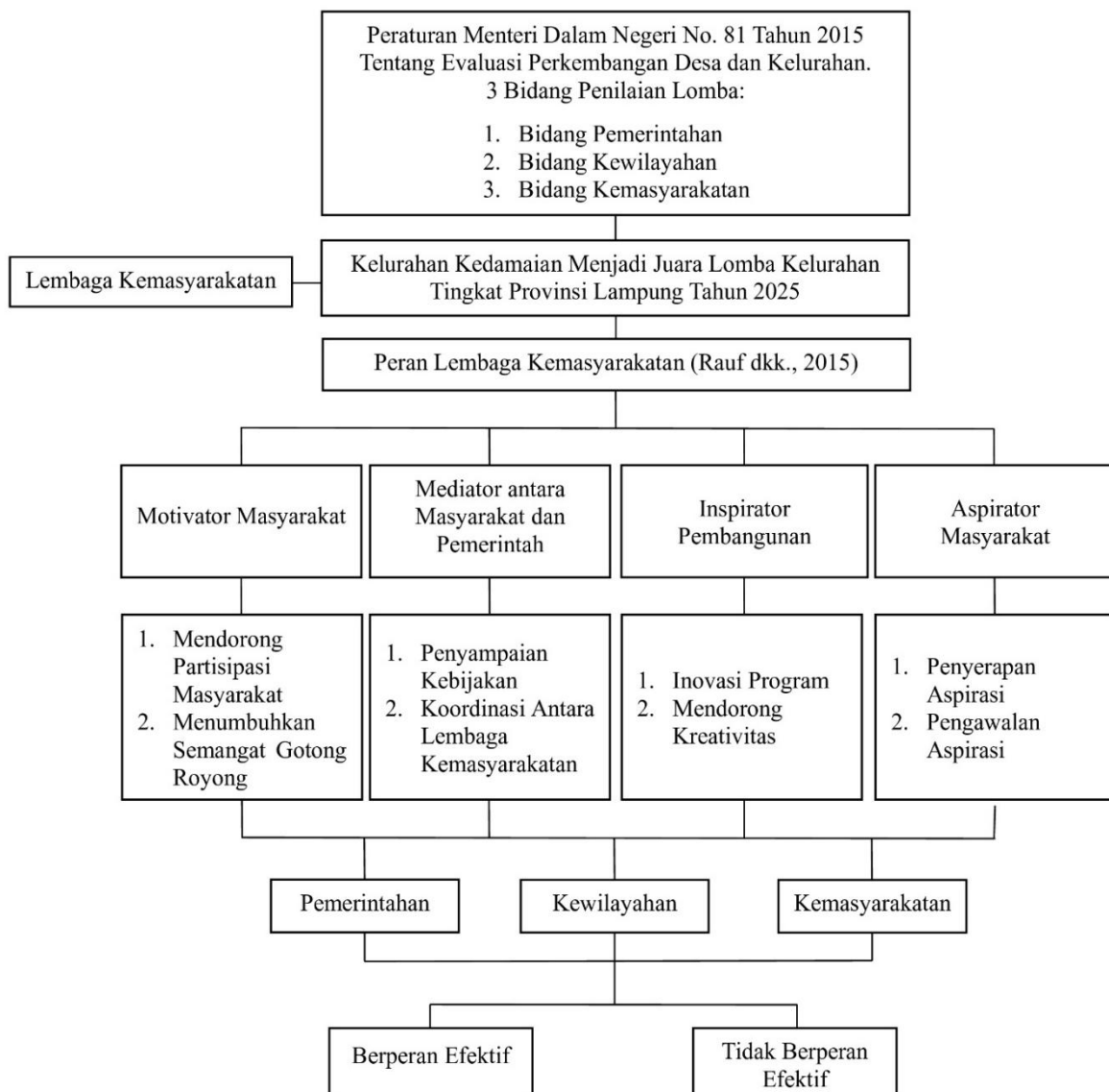
- b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
3. Bidang Kemasyarakatan
- Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;
 - h. penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, Kota Metro selalu meraih juara Lomba Kelurahan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019–2024. Pada Tahun 2025, Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung berhasil menjadi juara dan memutus dominasi tersebut. Perolehan ini menunjukkan adanya dampak dari salah satu indikator penilaian yaitu lembaga kemasyarakatan dalam mengelola dinamika sosial perkotaan yang kompleks dan berkontribusi terhadap kemenangan Kelurahan Kedamaian.

Kerangka berpikir dalam Penelitian ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara peran lembaga kemasyarakatan dengan keberhasilan Kelurahan Kedamaian dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025. Landasan utama kerangka pikir ini adalah bahwa pembangunan kelurahan tidak hanya ditopang oleh perangkat pemerintahan, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran aktif lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong partisipasi warga.

Menurut Rauf dkk (2015:209), lembaga kemasyarakatan berperan strategis dengan mendorong partisipasi dan kesadaran warga sebagai motivator, menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai mediator, menghadirkan ide dan inovasi pembangunan sebagai inspirator, serta menghimpun dan menyalurkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai aspirator.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 (Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)” menggunakan tipe Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran kelembagaan dalam memberdayakan masyarakat yang berkontribusi terhadap keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025 dan sudah sesuai atau belum dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Menurut Sugiyono (2013:59) dalam Hidayatullah (2022:38), Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang terkait dengan penelusuran teori dari bawah, serta membangun pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif dalam Penelitian tentang peran lembaga kemasyarakatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan meraih juara dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2025, bertujuan untuk memahami dan mendalami peran serta upaya lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat secara holistik serta mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dalam mendukung keberhasilan meraih juara pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek utama yang menjadi titik perhatian Penelitian, yaitu:

1. Peran sebagai Motivator Masyarakat

Fokus Penelitian ini melihat bagaimana lembaga kemasyarakatan mampu memberikan dorongan, semangat, dan rangsangan kepada masyarakat. Lembaga diharapkan menjadi motor penggerak partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan fisik, sosial, maupun ekonomi, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya keterlibatan kolektif.

2. Peran sebagai Mediator antara masyarakat dan pemerintah

Fokus Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Lembaga diharapkan mampu menyampaikan kebijakan dan program pemerintah warga agar tercipta hubungan yang lebih harmonis, transparan, dan partisipatif.

3. Peran sebagai Inspirator Pembangunan

Fokus Penelitian ini menelaah bagaimana lembaga kemasyarakatan menghadirkan ide, gagasan, dan inovasi yang mendorong kreativitas masyarakat dalam pembangunan. Lembaga diharapkan tidak hanya menunggu instruksi pemerintah, tetapi juga memunculkan inisiatif seperti kegiatan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, atau program sosial yang bermanfaat.

4. Peran sebagai Aspirator masyarakat

Fokus Penelitian ini menyoroti bagaimana lembaga kemasyarakatan menghimpun dan menyuarakan kebutuhan, pendapat, serta harapan masyarakat. Lembaga berfungsi memperjuangkan agar program dan kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembangunan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kelurahan Kedamaian, yang terletak di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* (sengaja), berdasarkan pertimbangan bahwa Kelurahan Kedamaian telah berhasil meraih juara dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2025, sebuah pencapaian yang sebelumnya tidak pernah diraih oleh kelurahan mana pun di Kota Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir.

Secara administratif, Kelurahan Kedamaian merupakan salah satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan Kedamaian. Wilayah ini memiliki karakteristik urban, dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 9.624 jiwa per tahun 2024. Penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi, menjadikannya sebagai kelurahan yang majemuk dan dinamis. Karakteristik ini menjadikan Kelurahan Kedamaian sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji bagaimana kelembagaan lokal mampu mengelola keberagaman sosial dan dinamika perkotaan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari ucapan dan tindakan narasumber melalui proses wawancara, serta didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2013:137). Adapun jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh Peneliti dari narasumber tanpa melalui perantara. Informasi ini dikumpulkan melalui teknik wawancara serta observasi untuk mendapatkan data yang relevan. Data primer dalam studi ini diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yaitu Lurah Kedamaian serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Ketua RT 01 Lingkungan 01, Kepala Lingkungan 01, Ketua LPM, Ketua TP PKK, dan Ketua Karang Taruna serta Masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan dokumen lainnya yang relevan untuk digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dalam pengolahan data Penelitian. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan Peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, buku, dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses Penelitian. Data sekunder dalam Penelitian ini diperoleh yakni buku-

buku, jurnal ilmiah tentang lembaga kemasyarakatan dan lomba desa dan kelurahan.

3.5 Informan

Informan dalam suatu Penelitian diartikan sebagai individu yang dijadikan sumber informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan konteks Penelitian (Sugiyono, 2013:253). Pada Penelitian ini, informan yang dilibatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Keterangan	Nama
1	Lurah Kedamaian	Neti Gusnina, S.E., M.M.
2	Ketua RT 01 LK 01	Alamsyah
3	Ketua LK 01	Nikmat Syarif
4	Ketua LPM	Hermansyah, S.Ag.
5	Ketua TP PKK	Mia Kurniasih, S.E.
6	Ketua Karang Taruna	Andika
7	Masyarakat	Drs. Mirwansyah
8	Masyarakat	Nuri Indrawati
9	Masyarakat	Mahdalena
10	Masyarakat	Siti Nabsiah
11	Masyarakat	Inkar Mila

Sumber: Data diolah Peneliti

Penelitian yang membahas peran lembaga kemasyarakatan dalam yang berkontribusi terhadap keberhasilan meraih juara dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2025, pemilihan informan yang sesuai menjadi hal yang krusial guna memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus kajian. Alasan pemilihan informan dalam Penelitian ini didasarkan pada peran strategis dan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025. Lurah dipilih karena berperan sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi seluruh lembaga kemasyarakatan.

Ketua RT dan LK dipilih karena mereka berada di tingkat paling dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika partisipasi warga di lapangan. Ketua LPM,

PKK, dan Karang Taruna dipilih karena masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, dan pelestarian budaya yang menjadi bagian dari indikator penilaian lomba. Sementara itu, masyarakat dipilih untuk memberikan pandangan objektif dan pengalaman langsung mengenai sejauh mana peran lembaga kemasyarakatan dirasakan dan berpengaruh terhadap kegiatan lomba di wilayah mereka. Seluruh informan dipilih secara sengaja karena dianggap paling memahami, dan terlibat langsung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:224) mengemukakan teknik pengumpulan data dalam Penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam Penelitian kualitatif karena memungkinkan Peneliti memperoleh pemahaman yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, motivasi, dan persepsi dari para informan. Pada konteks Penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk menggali secara langsung peran yang dijalankan oleh kelembagaan lokal seperti RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berkontribusi terhadap keberhasilan Kelurahan Kedamaian dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap terbuka terhadap pengembangan pertanyaan sesuai dengan dinamika yang muncul dalam proses wawancara. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang tidak terduga atau belum terpetakan dalam panduan pertanyaan awal, sehingga sangat sesuai untuk menggali konteks sosial dan praktik kelembagaan yang bersifat dinamis.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 30 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Neti Gusnina, S.E., M.M. sebagai Lurah Kedamaian pada pukul 10.00-10.45 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

2. Pada tanggal 30 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Mia Kurniasih, S.E. sebagai Ketua TP PKK Kelurahan Kedamaian pada pukul 11.00-11.35 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
3. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Nuri Indrawati sebagai masyarakat Kelurahan Kedamaian pada pukul 09.00-09.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
4. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Andika sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kedamaian pada pukul 09.40-10.15 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
5. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Mahdalena sebagai Masyarakat Kelurahan Kedamaian pada pukul 10.25-10.50 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
6. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Siti Nabsiah sebagai masyarakat Kelurahan Kedamaian pada pukul 10.50-11.15 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
7. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Inkar Mila sebagai Masyarakat Kelurahan Kedamaian pada pukul 11.15-11.40 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
8. Pada tanggal 31 Oktober 2025 Peneliti mewawancarai Nikmat Syarif sebagai Ketua Lingkungan 01 Kelurahan Kedamaian pada pukul 12.30-13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
9. Pada tanggal 1 November 2025 Peneliti mewawancarai Alamsyah sebagai Ketua RT 01 LK 01 Kelurahan Kedamaian pada pukul 12.30-13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
10. Pada tanggal 1 November 2025 Peneliti mewawancarai Drs. Mirwansyah sebagai masyarakat Kelurahan Kedamaian pada pukul 13.10-13.40 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
11. Pada tanggal 1 November 2025 Peneliti mewawancarai Hermansyah, S.Ag. sebagai Ketua LPM Kelurahan Kedamaian pada pukul 14.00-14.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus dalam Penelitian di lapangan. Pada konteks Penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara sistematis aktivitas, perilaku, dan interaksi yang terjadi dalam kelembagaan di Kelurahan Kedamaian, khususnya dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025. Tujuan utama dari observasi dalam Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran faktual dan empiris mengenai dinamika kelembagaan secara nyata, sebagaimana berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, tanpa melalui persepsi atau interpretasi langsung dari informan. Observasi memungkinkan Peneliti menangkap berbagai fenomena yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara, seperti kebiasaan kerja, suasana interaksi antarlembaga, pola koordinasi informal, serta intensitas kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga.

Hasil kegiatan observasi yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, Peneliti telah melakukan observasi intensif di Kelurahan Kedamaian untuk mengamati peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Peneliti mengamati aktivitas lembaga kemasyarakatan seperti RT, Kepala Lingkungan, LPM, TP PKK, dan Karang Taruna dalam menjalankan fungsi mereka di lapangan. Peneliti mengamati pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti gotong royong, kondisi fisik wilayah seperti kebersihan lingkungan, fasilitas pendukung lembaga, perbaikan jalan, kegiatan musyawarah, serta sarana yang dibangun berdasarkan usulan lembaga kemasyarakatan. Peneliti juga mengamati kegiatan rutin masyarakat seperti Jum'at Bersih dan Selasa Bersih untuk melihat tingkat partisipasi warga serta cara lembaga menggerakkan masyarakat. Hasil observasi ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana lembaga kemasyarakatan berperan dalam mendukung keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari dokumen resmi, arsip, laporan, media visual, maupun catatan administratif yang relevan dengan topik Penelitian. Dalam Penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data hasil wawancara dan observasi dengan bukti tertulis dan visual yang dapat diverifikasi.

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema serta rekaman suara pada saat wawancara dengan narasumber pada saat melakukan Penelitian. Berikut dokumen yang terdapat pada Penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu:

1. Wawancara dengan narasumber;
2. Pelaksanaan kegiatan terkait.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan agar data yang diperoleh menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai tujuan Penelitian (Nur dkk., 2024:165). teknik pengolahan data dalam Penelitian ini dijelaskan melalui langkah-langkah tertentu yang menjadi pedoman yaitu:

1. Edit Data

Tahap edit data dilakukan oleh Peneliti untuk memverifikasi dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi di lapangan. Tujuannya adalah memastikan keakuratan dan kelengkapan data.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses penjabaran dan pemaknaan atas hasil analisis. Pada tahap ini, data yang telah melalui proses penyuntingan dianalisis secara mendalam, lalu dijelaskan serta ditarik kesimpulan guna menggambarkan temuan utama dalam Penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini mencakup proses pengorganisasian, pengelompokan, pencarian pola, serta identifikasi data yang dianggap penting (Sugiyono, 2013:244). Analisis data dilakukan melalui tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan, mengingat jumlahnya yang cukup besar. Tahapan ini dilakukan dengan mencatat atau merekam informasi yang relevan, merangkum hal-hal esensial, dan menentukan fokus utama yang akan digunakan dalam Penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis agar dapat tersusun dalam pola yang jelas dan terstruktur. Tujuannya adalah mempermudah pembaca dalam memahami isi dan makna data. Dalam Penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir (*flowchart*), dan bentuk visual lainnya. Data yang disajikan dalam Penelitian ini mengenai Peran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dalam mendukung keberhasilan meraih juara dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam Penelitian kualitatif pada awalnya bersifat sementara dan akan terus berkembang seiring dengan proses pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan baru akan dianggap valid apabila didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten selama proses Penelitian berlangsung.

3.9 Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif ini, Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif melalui perbandingan data dari berbagai sudut (Sugiyono, 2013:241). Pada Penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Informasi dikumpulkan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kelembagaan di Kelurahan Kedamaian, seperti Lurah, ketua RT, ketua RW, ketua LPM, ketua PKK, ketua Karang Taruna, dan masyarakat umum. Melalui perbandingan informasi dari berbagai aktor tersebut, Peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian data antara pemerintah kelurahan, pengurus kelembagaan, dan warga. Proses ini memperkuat validitas data yang diperoleh dalam Penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data pada sumber yang sama. Peneliti tidak hanya mengandalkan wawancara mendalam, tetapi juga mengkombinasikannya dengan observasi langsung dan studi dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai peran lembaga kemasyarakatan diuji dengan cara mencocokkannya dengan temuan observasi di lapangan serta bukti dokumentasi yang tersedia, seperti notulen kegiatan, laporan program, dan dokumentasi foto. Melalui triangulasi teknik ini, keabsahan data dapat terjamin karena informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu teknik pengumpulan data saja..

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedamaian

Kelurahan Kedamaian merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang terletak di bagian timur dari Wilayah Kota Bandar Lampung. Kelurahan Kedamaian terletak di sebelah timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Panjang dan Kecamatan Sukarame, nama Kedamaian diberikan oleh Pemerintahan Belanda pada Tahun 1928 dan nama tersebut disetujui oleh tua-tua kampung, yang mempunyai arti “PERDAMAIAN” antara Keraton Balaw dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 08 Juni 1982 Kampung Kedamaian masuk kedalam wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Madya Bandar Lampung dengan berubah status dari Kampung menjadi Kelurahan. Pada tanggal 10 Agustus 1988 Kelurahan Kedamaian dimekarkan menjadi 2 yaitu Kelurahan Pemekaran Campang Raya dan Kedamaian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 pada tanggal 04 Oktober 2012 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur menjadi pemekaran Kecamatan Kedamaian. Adapun mantan-mantan Kepala Kampung/Kelurahan yang menjabat yaitu:

Tabel 3. Nama – Nama Kepala Kampung atau Lurah di Kelurahan Kedamaian

No	Nama	Periode
1	TUMENNGUNG	-
2	A. TAHAR	-
3	A. HAMID	-
4	P.N. NURJATI	1945 – 1968
5	MAHADI BALAW	1968 – 1974
6	YAHYA HUSIN ST. SEJATI	1974 – 1984
7	SYARIFUDDIN SULAIMAN	1984 – 1989
8	SYARFI. YS	1989 – 1990
9	TUHID	1990 – 1992
10	Drs. ASRORI	1992 – 1993
11	SULFAKAR, BA	1993 – 1995
12	SYAMSUL BAHRI	1995 – 2002

13	A. SANIP, SE	2004 – 2007
14	Drs. SUHERMAN. P	2007 – 2008
15	ZAINI, S.Sos.	2008 – 2011
16	AMIRUDDIN, S.Sos.	2011 – 2013
17	Drs. Hi. RUSLI BURHANUDDIN	2015 – 2016
18	MURSID ARIYANTO	2016 – 2017
19	BUNYAMIN, SH.	2017 – 2021
20	NETI GUSNINA, SE.	2021 – Sekarang

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

4.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kelurahan Kedamaian memiliki luas wilayah 175 Ha dengan jumlah penduduk 9.624 Jiwa yang terbagi menjadi 2 lingkungan dan 18 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya II
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru

4.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis Kelurahan Kedamaian berada pada ketinggian tanah 150 M di atas permukaan laut dimana kawasan Kelurahan Kedamaian berada di daerah dataran tinggi dan memiliki suhu udara rata – rata harian antara 24° C - 34° C.

4.1.3 Orbitasi

- Jarak Kelurahan dengan Kecamatan Kedamaian: ± 2.5 Km
- Jarak Kelurahan dengan Kota Administratif: ± 3.5 Km
- Jarak Kelurahan dengan Ibukota/Kab. Kota: ± 3.5 Km
- Jarak Kelurahan dengan Provinsi: ± 7 Km
- Jarak Kelurahan dengan Ibukota Negara: ± 300 Km

4.2 Potensi Penduduk

4.2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kedamaian

Potensi penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu wilayah. Data kependudukan memberikan gambaran tentang jumlah, komposisi, serta karakteristik masyarakat yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Melalui analisis potensi penduduk, dapat diketahui tingkat pendidikan, usia produktif, serta jenis pekerjaan yang dominan di wilayah tersebut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lingkungan I	3.531	3.509	7.040
2.	Lingkungan II	1.292	1.292	2.584
	Jumlah	4.823	4.801	9.624

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Kedamaian berdasarkan Jumlah KK

No.	Jumlah KK	RT/LK
1.	134	RT. 001 LK. I
2.	205	RT. 002 LK. I
3.	260	RT. 003 LK. I
4.	174	RT. 004 LK. I
5.	183	RT. 005 LK. I
6.	146	RT. 006 LK. I
7.	137	RT. 007 LK. I
8.	109	RT. 008 LK. I
9.	148	RT. 009 LK. I
10.	102	RT. 010 LK. I
11.	110	RT. 011 LK. I
12.	198	RT. 012 LK. I
13.	313	RT. 013 LK. I
14.	145	RT. 001 LK II
15.	119	RT. 002 LK II
16.	234	RT. 003 LK II
17.	217	RT. 004 LK II
18.	111	RT. 005 LK II
Jumlah	3.045	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Indikator	Jumlah
1.	Islam	8.790
2.	Kristen	277
3.	Katolik	230
4.	Hindu	4
5.	Budha	323
	Jumlah	9.624

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 7. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	Indikator	Jumlah
1.	0 – 16 Tahun	3.043
2.	17 – 54 Tahun	4.844
3.	55 Tahun Keatas	1.737
	Jumlah	9.624

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 8. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Indikator	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	854
2.	TK	681
3.	SD	1.431
4.	SMP/Sederajat	1.495
5.	SMA/Sederajat	3.189
6.	Sarjana Muda	651
7.	Sarjana	1.323
	Jumlah	9.624

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 9. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis	Jumlah
1.	PNS	230
2.	TNI/POLRI	46
3.	Dagang	662
4.	Tani	5
5.	Tukang	142
6.	Buruh Harian Lepas	693
7.	Pensiunan	184
8.	Lain – lain	7.662
	Jumlah	9.624

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

4.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana

Potensi penduduk serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi penduduk menggambarkan jumlah, komposisi, dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama pembangunan. Sementara itu, sarana dan prasarana seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum berperan dalam menunjang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup.

Tabel 10. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Jenis	Jumlah
1.	<i>Play Group</i>	-
2.	Kober	-
3.	Paud	-
4.	TK	5
5.	SD/MI	1
6.	SMP/Sederajat	-
7.	SMA/Sederajat	-
8.	Lembaga	-
9.	Kursus	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

Tabel 11. Jumlah Sarana Keagamaan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Musholla	7
3.	Gereja	1
4.	Wihara/Klenteng	-
5.	Pura	-

Sumber: Buku Profil Kelurahan Kedamaian Tahun 2024.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Penelitian Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 (Studi di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung) bahwa Lembaga Kemasyarakatan berperan efektif dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Namun, masih terdapat tantangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran sebagai motivator masyarakat

Peran lembaga kemasyarakatan sebagai motivator masyarakat terlihat dari kemampuan lembaga dalam mendorong partisipasi warga pada kegiatan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan seperti pasar murah, kerja bakti, dan gotong royong sehingga mendukung pencapaian dalam Lomba Kelurahan.

2. Peran sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah

Peran lembaga kemasyarakatan sebagai mediator terlihat dari kemampuan lembaga dalam menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan, baik dalam penyampaian informasi program, kebutuhan wilayah, maupun kegiatan sosial sehingga komunikasi berjalan baik dan mendukung pencapaian dalam Lomba Kelurahan.

3. Peran sebagai inspirator pembangunan

Peran lembaga kemasyarakatan sebagai inspirator pembangunan terlihat dari kemampuan lembaga dalam memberikan ide dan contoh kegiatan pembangunan seperti pembentukan Pos Koperasi Kelurahan, bank sampah, serta kegiatan kerajinan PKK yang membantu mendukung penilaian Lomba Kelurahan meskipun masih ada warga yang belum sepenuhnya memahami ide tersebut.

4. Peran sebagai aspirator masyarakat

Peran lembaga kemasyarakatan sebagai aspirator masyarakat terlihat dari kemampuan lembaga dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah kelurahan serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti pembuatan eco-enzyme dan perbaikan infrastruktur sehingga program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat Peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kedamaian:

1. Kelurahan Kedamaian dan Lembaga Kemasyarakatan sebaiknya perlu melakukan survei partisipasi warga minimal tiga kali dalam satu tahun. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan, pemberdayaan, dan pembangunan kelurahan. Data hasil survei digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pemberdayaan berikutnya.
2. Kelurahan Kedamaian dan Lembaga Kemasyarakatan menyampaikan informasi singkat mengenai rencana kebijakan atau program kegiatan selanjutnya pada setiap pertemuan atau kegiatan sosial, agar masyarakat memperoleh gambaran awal serta memperkuat kesinambungan komunikasi antara pemerintah dan warga.
3. Kelurahan Kedamaian dan Lembaga Kemasyarakatan sebaiknya mengadakan bazar produk warga secara berkala bertujuan untuk memberi ruang nyata bagi masyarakat dalam menampilkan dan menjual hasil usahanya, seperti makanan, kerajinan, atau produk rumah tangga.
4. Kelurahan Kedamaian dan Lembaga Kemasyarakatan sebaiknya menyediakan layanan aspirasi saat kegiatan sosial seperti gotong royong berarti membuka ruang penyampaian pendapat secara langsung di sela-sela kegiatan bersama, misalnya dengan menyiapkan satu pengurus RT/RW atau LPM yang bertugas mencatat masukan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, A. (2023). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan *good governance*: Studi kasus Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 1(2), 48–60.
- Apicha, L. M. (2023). *Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf A Nomor 42 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi pada Kelurahan Komerling Lampung Tengah)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Arisanti, E., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Komunikasi Terhadap Keberhasilan Lomba Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, halaman 59–73.
- Chaniago, D. S., Rani, A. P., & Solikatun. (2019). Peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1), 82–99.
- Hidayatullah, F. (2022). Implementasi Kebijakan Perekrutan Tenaga Kerja Disabilitas di BUMN DKI Jakarta. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 406–422.
- Humapi, J., Ogotan, M., & Laloma, A. (2020). Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(2), 112–121.
- Jaelani, M. A., & Istiqomah, N. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen*, halaman 1–7.
- Karmenita. (2023). Peran Fungsi Pekerja Perempuan Dalam Perekonomian Keluarga Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Khadikah, N. N., & Muljanto, M. A. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 565–573.

- Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Mala, A. T., Liando, D. M., & Waworundeng, W. (2022). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 2(2), 31–44.
- Nita, R., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). *Peranan lembaga sosial dalam melestarikan adat budaya Lampung pada remaja*. (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung).
- Nur, M. A., Siahu, M.. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 4(02), 7823–7830.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Sosieta Jurnal Pendidikan Sosiologi Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939.
- Rahmawati, A. Asrori, H. S. (2015). *Implication Champion Village Competition in Village Development*. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 297–306.
- Rantung, J. F., Mandey, J., & Londa, V. Y. (2021). Peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi*, 3(1), 198–209.
- Rosyida, I. A., Masruroh, A., Rifaldi, A. T., Sulaksono, M. A. H., & Gumelang, E. M. (2021). Edukasi peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Krangkong. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 76–83.
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwa, J. L., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*.
- Wahyuningsih, Y. dan Choriyah, I. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Niara*, 18(1), 1–14.
- Wangania, E. W., Pangemanan, S. (2018). Peran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xv Manado Dalam Pemeliharaan Jalan Tahun 2017 (Studi Kasus Jalan Luas Wilayah Buyat-Molobog-Onggunoi). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1-10.
- Yuli, Usman, B., & Helmi. (2023). Peran Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Simpang Kiri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8, 1–16.